

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sesuai nomenklatur Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2025.

4.1. Uraian Program

Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 terdiri 4 Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 10 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
10. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
11. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

4.3. Uraian Sub Kegiatan

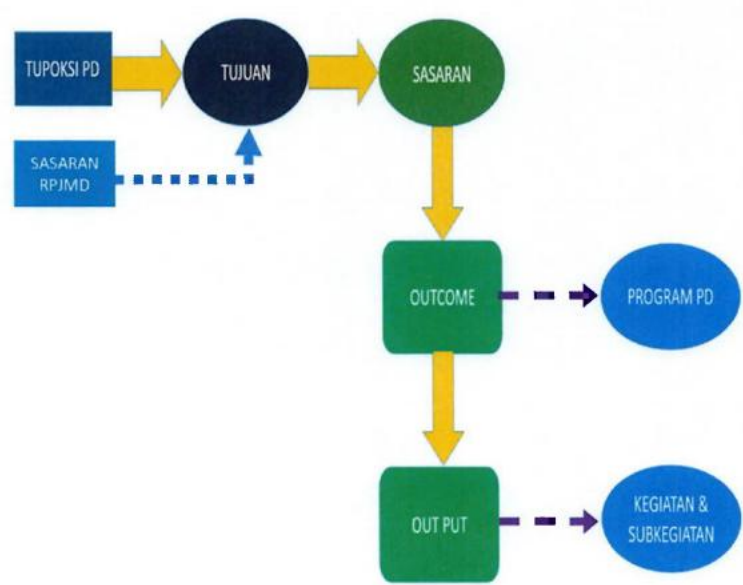
Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 48 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
9. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
12. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
13. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
16. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
17. Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
18. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
20. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
21. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
25. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
27. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
29. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
35. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
36. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
37. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

38. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
39. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
40. Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
41. Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
42. Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
43. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi
44. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
45. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi
46. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
47. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Matrik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026 - 2030 Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
			Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	dokumen	Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
				laporan	Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	
				rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	
				rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				dokumen	-Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	
				Persentase	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Persentase	<i>Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri</i>	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan indstri besar sepanjang merupakan Penanaman	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				dokumen	Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Risk Base Approach (OSS RBA) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	100%	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				100%	<i>Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	
				Persentase	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Persentase	<i>Persentase ketercapaian terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
				dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
				laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				-	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				-	Jumlah Dokumen Hasil	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah	
				100%	<i>Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
				Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase	<i>Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase	<i>Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
				dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase	<i>Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase	<i>Persentase ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
				Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				100%	<i>Persentase ketercapaian tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				100%	<i>terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000	1 dokumen	Rp20.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	38.783.000	1 laporan	27.000.000	1 laporan	Rp175.000.000	1 laporan	Rp175.000.000	1 laporan	Rp180.000.000	1 laporan	Rp180.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	18.960.825	1 laporan	13.460.825	1 laporan	Rp163.000.000	1 laporan	Rp163.000.000	1 laporan	Rp163.000.000	1 laporan	Rp163.000.000		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	-	-	-	-	-	Rp137.000.000	-	Rp137.000.000	-	Rp137.000.000	-	Rp137.000.000		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	Rp140.000.000	-	Rp140.000.000	-	Rp160.000.000	-	Rp160.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	100%	7.351.106.000	100%	8.673.655.328	100%	9.150.474.175	100%	9.644.786.592	100%	10.144.786.592	100%	10.144.986.592		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		7.127.606.000		8.400.155.328		Rp8.750.474.175		Rp9.244.786.592		Rp9.744.786.592		Rp9.744.986.59 2		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		220.000.000		250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.500.000	1 laporan	3.500.000	1 laporan	Rp50.000.000	1 laporan	Rp50.000.000	1 laporan	Rp50.000.000	1 laporan	Rp50.000.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	52.444.295	100%	42.680.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	48.884.295	1 dokumen	42.680.000	1 dokumen	Rp115.000.000	1 dokumen	Rp115.000.000	1 dokumen	Rp115.000.000	1 dokumen	Rp115.000.000		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.560.000	1 laporan	-	1 laporan	Rp115.000.000	1 laporan	Rp115.000.000	1 laporan	Rp115.000.000	1 laporan	Rp115.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	36.402.000	100%	36.402.000	100%	420.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000		
Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	Rp120.000.000	1 dokumen	Rp120.000.000	1 dokumen	Rp120.000.000	1 dokumen	Rp120.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	36.402.000	1 Orang	36.402.000	10 Orang	Rp300.000.000	10 Orang	Rp290.000.000	10 Orang	Rp290.000.000	10 Orang	Rp290.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	946.909.059	100%	829.299.169	100%	1.950.000.000	100%	2.450.000.000	100%	2.450.000.000	100%	2.450.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.741.530	1 Paket	30.000.000	1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp100.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	204.117.940	1 Paket	157.249.580	1 Paket	Rp450.000.000	1 Paket	Rp550.000.000	1 Paket	Rp550.000.000	1 Paket	Rp550.000.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.000.000	1 Paket	49.000.000	1 Paket	Rp250.000.000	1 Paket	Rp350.000.000	1 Paket	Rp350.000.000	1 Paket	Rp350.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	Rp150.000.000	1 Paket	Rp150.000.000	1 Paket	Rp150.000.000	1 Paket	Rp150.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.281.500	1 Paket	27.281.500	1 Paket	Rp50.000.000	1 Paket	Rp50.000.000	1 Paket	Rp50.000.000	1 Paket	Rp50.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000	1 dokumen	Rp50.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	555.768.089	1 laporan	515.768.089	1 laporan	Rp900.000.000	1 laporan	Rp1.200.000.000	1 laporan	Rp1.200.000.000	1 laporan	Rp1.200.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	-	0	100%	Rp450.000.000		Rp-		Rp-		Rp-		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	-	-	-	1 unit	Rp450.000.000		Rp-		Rp-		Rp-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	100%	2.035.833.955	100%	2.017.492.845	100%	2.430.000.000	100%	2.600.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	Rp70.000.000	1 laporan	Rp70.000.000	1 laporan	Rp70.000.000	1 laporan	Rp70.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	767.492.845	1 laporan	767.492.845	1 laporan	Rp1.120.000.000	1 laporan	Rp1.290.000.000	1 laporan	Rp1.390.000.000	1 laporan	Rp1.390.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.258.341.110	1 laporan	1.240.000.000	1 laporan	Rp1.240.000.000	1 laporan	Rp1.240.000.000	1 laporan	Rp1.240.000.000	1 laporan	Rp1.240.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100%	1.008.200.000	100%	708.200.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	416.500.000	9 unit	416.500.000	9 unit	Rp500.000.000	9 unit	Rp500.000.000	9 unit	Rp500.000.000	9 unit	Rp500.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	41.700.000	1 unit	41.700.000	1 unit	Rp250.000.000	1 unit	Rp250.000.000	1 unit	Rp250.000.000	1 unit	Rp250.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	550.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	Rp700.000.000	1 unit	Rp700.000.000	1 unit	Rp700.000.000	1 unit	Rp700.000.000		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengeolahan terhadap PDRB (%))	18,90	2.924.954.831	19,53	8.641.895.905	20,03	16.679.512.417	20,53	16.925.200.000	21,11	17.250.200.000	21,67	18.200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan industri pengolahan (%)	5,15		5,16		5,17		5,18		5,19		5,20			
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34		2,39		2,44		2,49		2,54		2,59			
	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100%	2.924.954.831	100%	8.641.895.905	100%	16.679.512.417	100%	16.925.200.000	100%	17.250.200.000	100%	18.200.000.000		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 dokumen	44.970.705	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	Rp260.000.000	1 dokumen	Rp260.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	135.341.600	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	Rp726.000.000	1 dokumen	Rp726.000.000	1 dokumen	Rp726.000.000	1 dokumen	Rp726.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1.013.529.000	1 dokumen	7.130.129.000	1 dokumen	Rp7.968.512.417	1 dokumen	Rp7.968.200.000	1 dokumen	Rp7.968.200.000	1 dokumen	Rp8.378.000.000		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	612.864.732	1 dokumen	339.915.937	1 dokumen	Rp2.100.000.000	1 dokumen	Rp2.246.000.000	1 dokumen	Rp2.246.000.000	1 dokumen	Rp2.346.000.000		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1.078.920.000	1 dokumen	1.061.850.968	1 dokumen	Rp2.320.000.000	1 dokumen	Rp2.420.000.000	1 dokumen	Rp2.660.000.000	1 dokumen	Rp3.000.000.000	100.000 sultan muda sumsel	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	39.328.794	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	Rp255.000.000	1 dokumen	Rp255.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000	1 dokumen	Rp300.000.000		
Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	1 laporan	-	-	-		Rp800.000.000		Rp800.000.000		Rp800.000.000		Rp850.000.000		
Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	1 rekomendasi	-	-	-		Rp800.000.000		Rp800.000.000		Rp800.000.000		Rp800.000.000		
Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 rekomendasi	-	-	-		Rp800.000.000		Rp800.000.000		Rp800.000.000		Rp800.000.000		
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	~Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 dokumen	-	-	-		Rp650.000.000		Rp650.000.000		Rp650.000.000		Rp700.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	100 %	242.128.750	100 %	150.060.725	100 %	825.000.000	100 %	850.000.000	100 %	875.000.000	100 %	900.000.000		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	100%	242.128.750	100%	150.060.725	100%	825.000.000	100%	850.000.000	100%	875.000.000	100%	900.000.000		
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan indstri besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	1 dokumen	96.723.025	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	Rp412.500.000	1 dokumen	Rp425.000.000	1 dokumen	Rp437.500.000	1 dokumen	Rp450.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	1 dokumen	145.405.725	1 dokumen	75.060.725	1 dokumen	Rp412.500.000	1 dokumen	Rp425.000.000	1 dokumen	Rp437.500.000	1 dokumen	Rp450.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat														
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya pemanfaatan informasi industri <i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	100%	172.318.250	100%	125.000.000	100%	750.000.000	100%	775.000.000	100%	800.000.000	100%	825.000.000		
	<i>Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	100%	172.318.250	100%	125.000.000	100%	750.000.000	100%	775.000.000	100%	800.000.000	100%	825.000.000		
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	87.940.250	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	Rp375.000.000	1 dokumen	Rp387.500.000	1 dokumen	Rp400.000.000	1 dokumen	Rp412.500.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	84.378.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	Rp375.000.000	1 dokumen	Rp387.500.000	1 dokumen	Rp400.000.000	1 dokumen	Rp412.500.000		
TOTAL PAGU			14.848.040.965		Rp21.285.146.797		Rp35.193.986.592		Rp36.193.986.592		Rp37.193.986.592		Rp38.193.986.592		

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan daerah dibangun berdasarkan skema berbasis data, kolaboratif, dan berkelanjutan yang diselaraskan dengan RPJMD dan RPJMN serta difokuskan melalui Musrenbang dan RKPD tahunan. Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan yang memuat 12 Program Strategis Utama sebagai kerangka utama mempercepat kemajuan Sumatera Selatan, ekonomi yang kuat, SDM unggul dan tata kelola bersih.

Sub kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel 4.3. dibawah ini:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	100.000 Sultan Muda Sumsel	Pelaku Industri yang memiliki jiwa enterprenuer yang tangguh dalam menghadapi ekonomi global.	Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan, Bimtek bagi pelaku industri dalam meningkatkan kualitas produk yang bernilai daya saing yang tinggi.

Dalam rangka mendukung keberhasilan 100.000 Sultan Muda Sumsel, Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan menyusun dan melaksanakan berbagai sub kegiatan yang bersifat lintas sektor dan partisipatif, guna menciptakan dampak langsung terhadap masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kegiatan yang mendukung Program Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel adalah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Industri Provinsi. Sedangkan subkegiatannya adalah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Melalui pelaksanaan sub kegiatan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, 100.000 Sultan Muda Sumsel diharapkan mampu menciptakan investasi dan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja utama perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Pencapaian Tujuan Strategis Utama yang akan dicapai Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan selama periode Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Daya Saing Industri dengan indikatornya Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi sektor industri terhadap PDRB) (%), Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%), Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%).

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 3 (tiga) indikator sebagai berikut pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO. (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	TARGET TAHUN						KET. (10)
			2025 (4)	2026 (5)	2027 (6)	2028 (7)	2029 (8)	2030 (9)	
1.	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%)	Persentase (%)	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67	
2.	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	Persentase (%)	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19	5,20	
3.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persentase (%)	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD

Penetapan indikator kinerja kunci perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 - 2029. Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Kinerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Provinsi memiliki tujuan dan *outcome* sesuai urusan. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan dan *outcome* Urusan Perindustrian berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut pada Tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO. (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	TARGET TAHUN						KET. (10)
			2025 (4)	2026 (5)	2027 (6)	2028 (7)	2029 (8)	2030 (9)	
1	Pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	%	15%	17%	19%	21%	23%	25%	
2	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	57,95%	59,34%	61,25%	63,19%	65,87%	67,89%	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Uaha Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	100	100	100	100	100	100	
6	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100	100	100	100	100	100	